



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI KAMIS, 23 JULI 2026



RINGKASAN BERITA HARI INI



PROYEK RAKSASA PEMBANGUNAN JALAN BLURU KIDUL TIDAK TRANSPARAN PUBLIK

Kabid Jalan Bungkam Bupati Subandi Warning Proyek harus Tepat Waktu

Sidoarjo, Pojok Kiri.-

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus memacu pembangunan infrastruktur demi mendukung kualitas pelayanan publik sekaligus menuntaskan persoalan genangan air di sejumlah wilayah strategis. Salah satu proyek prioritas yang tengah dikerjakan saat ini adalah peningkatan Jalan Raya Bluru Kidul, senilai 21,444 miliar yang dikerjakan oleh PT Tjakraindo Menganti luar Sidoarjo ini tidak sesuai harapan Bupati Sidoarjo la tanda-tanda bahwa kontraktor lokal harus mendapat prioritas pekerjaan katanya saat tanda tangan kontraktor di pendopo dengan para kontraktor.

SedangkanJoko Kabid Peningkatan Jalan bungkam saat dikonfirmasi wartawan saat dikonfirmasi via WhatsApp siapa yang kerjakan proyek Bluru Kidul- Sidoklumpuk tidak ada azas tranparansi publik. Hal ini dibuktikan langsung saat wartawan Pojok Kiri investigasi lokasi tidak ada transparansi publik tentang anggaran proyek tersebut karena tidak dipasang papan nama sesuai amanat Undang-undang keterbukaan informasi publik pasal 14 thn 2008.Sementara guna memastikan proyek berjalan sesuai target, Bupati Sidoarjo H.

Subandi meninjau langsung lokasi pengerjaan dengan didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) serta jajaran Forkopimka, Inspeksi mendadak ini menegaskan komitmen Pemkab Sidoarjo dalam

mengawal proyek agar selesai tepat waktu dan berdampak instan bagi masyarakat.

Bupati Subandi menyatakan, Jalan Raya Bluru Kidul mendapat atensi khusus karena selama bertahun-tahun menjadi titik rawan banjir yang melumpuhkan aktivitas warga. Padahal, ruas tersebut merupakan urat nadi menuju pusat pelayanan publik, termasuk Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sidoarjo.

"Peningkatan Jalan Bluru Kidul ini prioritas utama karena setiap musim hujan kawasan ini selalu tergenang. Akses warga

menuju pusat pelayanan jadi lumpuh. Karena itu, penanganannya wajib dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi," ujar Subandi di sela-sela peninjauan.

Ia menambahkan, saking mendesaknya proyek ini, Pemkab Sidoarjo bahkan melakukan pengalihan alokasi anggaran (shifting budget) yang semula diplot untuk penanganan jalan di Kecamatan Sedati.

Proyek ini tidak sekadar menaikkan elevasi badan jalan, melainkan sepaket dengan revitalisasi sistem drainase makro. Secara teknis, Jalan Raya Bluru Kidul akan dilebarkan menjadi 11 meter, dengan rincian perkerasan beton (rigid pavement) selebar 6 meter, serta dilengkapi bahu jalan dan trotoar di kedua sisi.

Tak hanya itu, Pemkab Sidoarjo juga tengah mengkaji Detail Engineering Design (DED) sistem pembuangan air menuju muara sungai, termasuk opsi pembangunan tanggul pengaman banjir rob. (Khol/Dy)

MUI Sidoarjo Tolak Gerai Penjual Miras

Pemkab Siap Tindak Tegas

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sidoarjo menyatakan sikap tegas menolak keberadaan kafe maupun gerai yang menjual minuman keras (miras). MUI menilai, maraknya peredaran miras berpotensi memicu persoalan sosial serta membuka akses yang lebih mudah bagi anak di bawah umur.

Ketua Komisi Fatwa, Perundang-undangan dan Hukum MUI Kabupaten Sidoarjo, Abdul Wahid Harun mengatakan, MUI telah menyampaikan keberatan kepada pemerintah daerah dan mendorong peninjauan ulang terhadap seluruh perizinan yang berkaitan dengan penjualan miras.

"Semua pihak sepakat untuk menaati kembali seluruh regulasi dan perizinan secara cermat. Kita tidak ingin bertindak gegabah, tetapi setiap langkah harus sah menurut hukum dan sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Abdul Wahid Harun Usain saat audiensi, Selasa (21/7/2026).

Ia mengapresiasi respons cepat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dinilai siap menindaklanjuti berbagai masukan dari MUI. Menurutnya, penanganan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai unsur agar tetap menjaga ketertiban masyarakat.

Abdul Wahid menegaskan, MUI menolak segala bentuk peredaran miras dan praktik kemaksiatan yang terorganisir. Menurutnya, sikap tersebut sejalan dengan identitas Sidoarjo sebagai Kota Santri yang memiliki ratusan pondok pesantren serta masyarakat yang menjunjung tinggi nilai agama dan kesucilaan. "Kami berharap menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI, kondisi Sidoarjo semakin kondusif dan bersih dari berbagai bentuk penyimpangan," ujarnya.

Dalam penelaahan yang dilakukan, MUI juga menemukan dugaan penyalahgunaan izin usaha perdagangan beras untuk aktivitas yang tidak sesuai dengan perizinannya.

Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana menegaskan pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti hasil pembahasan bersama MUI dan instansi terkait. "Beberapa izin operasional sudah diproses untuk ditutup, tinggal melengkapi administrasi. Satpol PP juga akan menyusun hasil pemeriksaan dan penindakan sebelum dilakukan rapat lanjutan untuk menentukan langkah berikutnya," kata Mimik.

Menurut Mimik, pemerintah juga akan menjalin koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat untuk merencanakan penindakan secara serentak apabila seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi. (md/rus)



Wakil Bupati Sidoarjo Sidak Sentra Kuliner Gajah Mada, Minta Penataan dan Percepat Revitalisasi

Sidoarjo, Pojok Kiri.-

Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, S.A.P., melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Sentra Kuliner Gajah Mada, Sidoarjo. Selasa (21/7/2026).

dalam kondisi seperti ini. Penataan harus segera dilakukan agar tempat ini lebih layak, aman, dan mampu menarik lebih banyak pengunjung," tegas Mimik. Saat berkeliling, Mimik juga

"Kalau sampai ada bagian bangunan yang jatuh dan menimpa pengunjung atau pedagang, siapa yang bertanggung jawab? Keselamatan harus menjadi prioritas," katanya.

berjualan di Sentra Kuliner Gajah Mada. Ia berharap penataan dan revitalisasi kawasan dapat mengembalikan keramaian sentra kuliner tersebut seperti beberapa tahun lalu.



PROYEK RAKSASA PEMBANGUNAN
JALAN BLURU KIDUL
TIDAK TRANSPARAN PUBLIK

Kabid Jalan Bungkam Bupati Subandi Warning Proyek harus Tepat Waktu

Sidoarjo, Pojok Kiri,- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus memacu pembangunan infrastruktur demi mendongkrak kualitas pelayanan publik sekaligus menuntaskan persoalan genangan air di sejumlah wilayah strategis. Salah satu proyek prioritas yang tengah dikebut saat ini adalah peningkatan Jalan Raya Bluru Kidul, senilai 21,444 miliar an yang dikerjakan oleh PT Tjkrindo Menganti luar Sidoarjo ini tidak sesuai harapan Bupati Sidoarjo la tanda-tanda bahwa kontraktor lokal harus mendapat prioritas pekerjaan katanya saat tanda tangan kontraktor di pendopo dengan para kontraktor. SedangkanJoko Kabid Peningkatan Jalan bungkam saat dikonfirmasi wartawan saat dikonfirmasi via WhatsApp siapa yang kerjakan proyek Bluru Kidul- Sidoklumpuk tidak ada azas tranparansi publik. Hal ini dibuktikan langsung saat war-

Pengumuman	Pejabat	Haril Exstawi	Pemegang	Peningkatan			
Nama Tender	Peningkatan Jalan Bluru Kidul (Sungai Teras) - Sidoarjo						
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi						
K/L/PO/Instansi Lainnya	Kab. Sidoarjo						
Sasaran Kerja	Dinas Peningkatan Jalan Bluru Kidul dan Sumber Daya Air						
Pagu	Rp. 21.442.211.442,00						
NPS	Rp. 21.442.211.442,00						
Nama Pemegang Amanat	NPMD						
DT Tjkrindo Menganti	Jalan Raya Kabupaten No. 158 A Kabupaten Klaten Menganti						
MDL	Kab Gresik - Gresik (Kab.) - Jawa Timur						
		Harga Perkiraan		Harga Teknis		Harga Rata-rata	
		Rp.		Rp.		Rp.	
		21.442.211.442,00		21.442.211.442,00		21.442.211.442,00	

tawan Pojok Kiri investigasi lokasi tidak ada transpansi publik tentang anggaran proyek tersebut karena tidak dipasang papan nama sesuai amanat Undang-undang keterbukaan informasi publik pasal 14 thn 2008.Sementara guna memastikan proyek berjalan sesuai target, Bupati Sidoarjo H. Subandi meninjau langsung lokasi pengerjaan dengan didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) serta jajaran Forkopimka, Inspeksi mendadak ini menegaskan komitmen Pemkab Sidoarjo dalam

mengawal proyek agar selesai tepat waktu dan berdampak instan bagi masyarakat. Bupati Subandi menyatakan, Jalan Raya Bluru Kidul mendapat atensi khusus karena selama bertahun-tahun menjadi titik rawan banjir yang melumpuhkan aktivitas warga. Padahal, ruas tersebut merupakan urat nadi menuju pusat pelayanan publik, termasuk Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sidoarjo. "Peningkatan Jalan Bluru Kidul ini prioritas utama karena setiap musim hujan kawasan ini selalu tergenang. Akses warga

menuju pusat pelayanan jadi lumpuh. Karena itu, penanganannya wajib dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi," ujar Subandi di sela-sela peninjauan. Ia membeberkan, saking mendesaknya proyek ini, Pemkab Sidoarjo bahkan melakukan pengalihan alokasi anggaran (shifting budget) yang semula diplot untuk penanganan jalan di Kecamatan Sedati. Proyek ini tidak sekadar menaikkan elevasi badan jalan, melainkan sepaket dengan revitalisasi sistem drainase makro. Secara teknis, Jalan Raya Bluru Kidul akan dilebarkan menjadi 11 meter, dengan rincian perkerasan beton (rigid pavement) selebar 6 meter, serta dilengkapi bahu jalan dan trotoar di kedua sisi. Tak hanya itu, Pemkab Sidoarjo juga tengah mengkaji Detail Engineering Design (DED) sistem pembuangan air menuju muara sungai, termasuk opsi pembangunan tanggul pengaman banjir rob. (Khol/Dy)



Wakil Bupati Sidoarjo Sidak Sentra Kuliner Gajah Mada, Minta Penataan dan Percepat Revitalisasi

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, S.A.P., melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Sentra Kuliner Gajah Mada, Sidoarjo, Selasa (21/7/2026). Sidak dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi bangunan, fasilitas, serta aktivitas para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berjualan di kawasan tersebut.

Dalam peninjauan itu, Mimik menemukan sejumlah persoalan yang dinilai perlu segera mendapat perhatian. Mulai dari kondisi bangunan yang kurang terawat, penataan lapak yang belum optimal, hingga ditemukannya retakan pada beberapa bagian bangunan yang dinilai membahayakan keselamatan pedagang maupun pengunjung.

Menurut Mimik, kondisi para pelaku UMKM membutuhkan langkah nyata dan percepatan penataan agar aktivitas ekonomi masyarakat kembali bergairah. "Kasihani pelaku UMKM. Jangan sampai mereka terus bertahan

dalam kondisi seperti ini. Penataan harus segera dilakukan agar tempat ini lebih layak, aman, dan mampu menarik lebih banyak pengunjung," tegas Mimik.

Saat berkeliling, Mimik juga menyoroti penempatan lapak pedagang yang dinilai kurang merata. Beberapa lapak berada di bagian belakang sehingga minim terlihat oleh pengunjung. Ia pun meminta untuk menata ulang posisi pedagang agar seluruh pelaku usaha memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pembeli.

"Kalau yang di belakang terus sepi karena tidak terlihat, tentu tidak adil. Penataannya harus dipikirkan supaya semua pedagang bisa berkembang," ujarnya.

Selain itu, Mimik menilai kondisi bangunan yang kusam, beberapa bagian yang retak, hingga fasilitas yang kurang terawat tidak mencerminkan adanya pemeliharaan yang optimal. Bahkan saat melihat retakan pada salah satu pilar bangunan, Mimik langsung meminta agar dilakukan pemeriksaan teknis secepatnya.

"Kalau sampai ada bagian bangunan yang jatuh dan menimpa pengunjung atau pedagang, siapa yang bertanggung jawab? Keselamatan harus menjadi prioritas," katanya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Amat Adi Subhan menjelaskan bahwa kawasan Sentra Kuliner Gajah Mada memiliki luas sekitar 2.147 meter persegi. Saat ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tengah mengusulkan program revitalisasi dengan konsep yang lebih modern.

"Konsep yang kami siapkan bukan hanya sentra kuliner, tetapi juga menjadi sentra oleh-oleh UMKM Kabupaten Sidoarjo yang dilengkapi ruang kelas untuk pelatihan dan pembinaan pelaku UMKM. Perencanaan sudah kami susun dan selanjutnya akan dibahas bersama tim TAPD," jelas Amat.

Harapan terhadap revitalisasi juga disampaikan para pedagang. Salah satunya, Ali Sabana, penjual sop buntut yang telah lama

berjualan di Sentra Kuliner Gajah Mada. Ia berharap penataan dan revitalisasi kawasan dapat mengembalikan keramaian sentra kuliner tersebut seperti beberapa tahun lalu.

Menurutnya, keberadaan kegiatan hiburan seperti live music maupun berbagai aktivitas akhir pekan dahulu cukup efektif menarik masyarakat datang ke sentra kuliner tersebut.

"Alhamdulillah kalau memang akan dikembangkan. Semoga semakin bagus dan ramai lagi seperti dulu. Dulu ada live musik dan di hari Minggu pagi ada senam yang sangat membantu penjualan kami. Mudah-mudahan nanti bisa dihidupkan kembali," harap Ali Sabana.

Melalui sidak tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menegaskan komitmennya dalam mempercepat penataan dan revitalisasi Sentra Kuliner Gajah Mada agar menjadi kawasan usaha yang lebih aman, nyaman, tertata, serta mampu menarik lebih banyak pengunjung. (Khol/ Dy)

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT

Selamat dan Bebas Pencemaran

KPAI: Problem Anak Banyak Terjadi di Keluarga, Pendidikan, dan Ruang Digital

Hari Anak Nasional, Perlindungan Buyung-Upik Jadi PR Besar

JAKARTA – Ada anak yang dirudapaksa puluhan orang di Sampang, Jawa Timur. Ada pula ayah biadab yang merudapaksa anak kandungnya selama 9 tahun di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Dua kasus itu hanya secuil contoh dari ribuan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam setahun terakhir (lihat grafis). Karena itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta agar peringatan Hari Anak Nasional hari ini (23/7) menjadi momentum pengingat bahwa perlindungan buyung dan upik masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi semua pihak, khususnya pemerintah.

KPAI mencatat, dalam tiga tahun terakhir, ada sekitar 6.900 aduan dugaan pelanggaran hak anak. Detailnya, sebanyak 3.883 pengaduan pada 2023, 2.057 pengaduan pada 2024, dan 2.031 pengaduan pada 2025 dengan jumlah korban mencapai 2.063 anak. Dari jumlah tersebut, 51,5 persen korban didominasi anak perempuan dan sisanya 47,6 persen anak laki-laki.

Diakui Ketua KPAI Aris Adi Leksono, jumlah pengaduan menunjukkan tren penurunan. Namun, hal itu belum



MOMENTUM PENGINGAT: Para peserta membuat batik ecoprint saat puncak peringatan Hari Anak Nasional Ke-42 Tahun 2026 di Lapangan Garuda Mandala, Candi Prambanan, Sleman, Jogjakarta, kemarin (22/7).

KEKERASAN PADA ANAK DALAM SETAHUN TERAKHIR



mencerminkan penurunan tingkat pelanggaran hak buyung dan upik.

“Dalam momentum Hari Anak Nasional ini, perlindungan anak masih pada situasi jalan terjal,” ujar Aris da-

lam taklimat media di Jakarta kemarin (22/7).

Gizi Buruk

Menurutnya, berdasarkan hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat se-

panjang tiga tahun terakhir, persoalan perlindungan anak masih didominasi permasalahan di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, dan ruang digital. Tak heran bila klaster keluarga

dan pengasuhan alternatif secara konsisten menjadi penyumbang pengaduan tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Masing-masing 1.569 kasus pada 2023, 1.097 kasus pada 2024, dan 1.037 kasus pada 2025 atau sekitar 51,06 persen dari total pengaduan.

Masalah kesehatan dan pendidikan anak pun masih belum sepenuhnya diselesaikan pemerintah. KPAI terus menerima aduan soal layanan kesehatan, gizi buruk, stunting, hingga dugaan malapraktik pada anak hingga tahun lalu.

“Termasuk mengenai Program Makan Bergizi Gratis,” kata Aris. (mia/ttg)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Wabup Minta Percepat Revitalisasi Sentra Kuliner Gajah Mada

Sidoarjo, Memorandum

Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo H Mimik Idayana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Sentra Kuliner Gajah Mada, Sidoarjo, Selasa (21/7). Sidak dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi bangunan, fasilitas, serta aktivitas para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berjualan di kawasan tersebut.

Dalam peninjauan itu, Mimik menemukan sejumlah persoalan yang dinilai perlu segera mendapat perhatian. Mulai dari kondisi bangunan yang kurang terawat, penataan lapak yang belum optimal, hingga ditemukannya retakan pada beberapa bagian bangunan yang dinilai membahayakan keselamatan pedagang maupun pengunjung.

Menurut Mimik, kondisi para pelaku UMKM membutuhkan langkah nyata dan percepatan penataan agar aktivitas ekonomi masyarakat kembali bergairah.

"Kasihani pelaku UMKM. Jangan sampai mereka terus bertahan dalam kondisi seperti ini. Penataan harus segera dilakukan agar tempat ini lebih layak, aman, dan mampu menarik lebih banyak pengunjung," tegas Mimik.

Saat berkeliling, Mimik juga menyoroti penempatan lapak pedagang yang dinilai kurang merata. Beberapa lapak berada di bagian belakang sehingga minim terlihat oleh pengunjung. Ia pun meminta untuk menata ulang posisi pedagang agar seluruh pelaku usaha memperoleh

kesempatan yang sama untuk mendapatkan pembeli.

"Kalau yang di belakang terus sepi karena tidak terlihat, tentu tidak adil. Penataannya harus dipikirkan supaya semua pedagang bisa berkembang," ujarnya.

Selain itu, Mimik menilai kondisi bangunan yang kusam, beberapa bagian yang retak, hingga fasilitas yang kurang terawat tidak mencerminkan adanya pemeliharaan yang optimal. Bahkan saat melihat retakan pada salah satu pilar bangunan, Mimik langsung meminta agar dilakukan pemeriksaan teknis secepatnya.

"Kalau sampai ada bagian bangunan yang jatuh dan menimpa pengunjung atau pedagang, siapa yang bertanggung jawab? Keselamatan harus menjadi prioritas," katanya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Amat Adi Subhan menjelaskan bahwa kawasan Sentra Kuliner Gajah Mada memiliki luas sekitar 2.147 meter persegi.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tengah mengusulkan program revitalisasi dengan konsep yang lebih modern.

"Konsep yang kami siapkan bukan hanya sentra kuliner, tetapi juga menjadi sentra oleh-oleh UMKM Kabupaten Sidoarjo yang dilengkapi ruang kelas untuk pelatihan dan pembinaan pelaku UMKM. Perencanaan sudah kami susun dan selanjutnya akan dibahas bersama tim TAPD," jelas Amat.

Harapan terhadap revitalisasi juga disampaikan para pedagang. Salah satunya, Ali Sabana, penjual sop buntut yang telah lama berjualan di Sentra Kuliner Gajah Mada.

Ia berharap penataan dan revitalisasi kawasan dapat mengembalikan keramaian sentra kuliner tersebut seperti beberapa tahun lalu. Menurutnya, keberadaan kegiatan hiburan seperti live music maupun berbagai aktivitas akhir pekan dahulu cukup efektif menarik masyarakat datang ke sentra kuliner tersebut.

"Alhamdulillah kalau memang akan dikembangkan. Semoga semakin bagus dan ramai lagi seperti dulu. Dulu ada live musik dan di hari Minggu pagi ada senam yang sangat



Wabup Sidoarjo sidak sentra kuliner Gajah Mada.

membantu penjualan kami. Mudah-mudahan nanti bisa dihidupkan kembali," harap Ali Sabana.

Melalui sidak tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menegaskan komitmennya dalam mempercepat penataan dan revitalisasi Sentra Kuliner Gajah Mada agar menjadi kawasan Mada yang lebih aman, nyaman, tertata, serta mampu menarik lebih banyak pengunjung. (hum/jok/fdn)

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

RAMO LEGI, 23 JULI 2026

KEPALA BIRO: JURUSAN WARTAWAN/KLAN: Keristion SH MKn, Mohammad Suud SH MH, Akhmad Junaedi, Tri Wahyugiono, Humaidi PEMASARAN: Suprianto, Pitono. TELEFON REDAKSI: 03130303000 HALAMAN 1

Pemkab Optimistis Wujudkan Lingkungan Sehat Bagi Warga

Sidoarjo, Memorandum

Pemkab Sidoarjo terus berupaya memperkuat komitmen mewujudkan lingkungan sehat dan bebas pencemaran. Termasuk melalui penilaian Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 5 pilar.

Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup warga sekaligus menekan risiko penyakit berbasis lingkungan. Proses verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikator STBM Provinsi Jawa Timur di enam kecamatan dan 12 desa/kelurahan yang menjadi sampel.

Lokasi tersebut meliputi Kecamatan Buduran (Desa Sidokepung dan Wadungasih), Waru (Desa Tambak Sumur dan Tambak Sawah), Sedati (Desa Pabean dan Sedati Agung), Tanggulangin (Desa Ketapang dan Putat), Porong (Desa Candipari dan Glagaharum), serta Prambon (Desa Jati Alun-alun dan Temu).

Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati menyatakan, capaian sanitasi Sidoarjo sejauh ini merupakan hasil kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

Menurut dia, komitmen daerah tidak berhenti pada status Open Defecation Free (ODF) atau Bebas Buang Air



Pemkab berusaha mewujudkan lingkungan sehat.

Besar Sembarangan yang diraih pada 2024, melainkan berlanjut menuju status STBM Paripurna. "Dari total 604.048 kepala keluarga di Sidoarjo, sebanyak 308.789 KK telah disurvei dan hasilnya 100 persen berstatus ODF. Ini menjadi modal penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat," kata Fenny dalam rapat koordinasi STBM di Kantor Setda Sidoarjo, Selasa (21/7).

Selain status ODF indikator penerapan sanitasi lainnya di Sidoarjo menunjukkan tren positif. Sebanyak 99,78 persen rumah tangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, 95,43 persen pengelolaan sampah rumah tangga, serta 73,6 persen telah memiliki pengelolaan air limbah rumah tangga.

Fenny menegaskan, upaya memenuhi target 100 persen pada seluruh pilar membutuhkan sinergi lintas sektor (hexabelix). Sanitasi tidak dapat dipandang hanya sebagai isu kesehatan, tetapi juga berkelindan dengan lingkungan, infrastruktur, pendidikan, peran dunia usaha, media, dan kesadaran warga.

Sementara itu, Tim Verifikator STBM Provinsi Jawa Timur mengapresiasi rekam jejak Sidoarjo. Setelah meraih predikat ODF pada 2024, Sidoarjo meraih Juara 1 STBM Award Tingkat Pratama Nasional (2024) dan Tingkat Madya Nasional (2025). Pada 2026, Pemprov Jatim mendorong seluruh daerah bergerak masif memenuhi 5 Pilar STBM secara komprehensif.

Dalam verifikasi lapangan, tim meninjau langsung penerapannya di pemukiman warga. Penilaian ini bertujuan memastikan capaian sanitasi tidak sebatas data administratif, melainkan benar-benar tercermin dalam perilaku hidup bersih dan sehat warga sehari-hari. (hum/jok/fdn)

MEMORANDUM

BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

MUI Sidoarjo Tolak Gerai Penjual Miras

Pemkab Siap Tindak Tegas

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sidoarjo menyatakan sikap tegas menolak keberadaan kafe maupun gerai yang menjual minuman keras (miras). MUI menilai, maraknya peredaran miras berpotensi memicu persoalan sosial serta membuka akses yang lebih mudah bagi anak di bawah umur.

Ketua Komisi Fatwa, Perundang-undangan dan Hukum MUI Kabupaten Sidoarjo, Abdul Wahid Harun mengatakan, MUI telah menyampaikan keberatan kepada pemerintah daerah dan mendorong peninjauan ulang terhadap seluruh perizinan yang berkaitan dengan penjualan miras.

"Semua pihak sepakat untuk menelaah kembali seluruh regulasi dan perizinan secara cermat. Kita tidak ingin bertindak gegabah, tetapi setiap langkah harus sah menurut hukum dan sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Abdul Wahid Harun Usain saat audiensi, Selasa (21/7/2026).

Ia mengapresiasi respons cepat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dinilai siap menindaklanjuti berbagai masukan dari MUI. Menurutnya, penanganan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai unsur agar tetap menjaga ketertiban masyarakat.

Abdul Wahid menegaskan, MUI menolak segala bentuk peredaran miras dan praktik kemaksiatan yang terorganisir. Menurutnya, sikap tersebut sejalan dengan identitas Sidoarjo sebagai Kota Santri yang memiliki ratusan pondok pesantren serta masyarakat yang menjunjung tinggi nilai agama dan kesusilaan. "Kami berharap menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI, kondisi Sidoarjo semakin kondusif dan bersih dari berbagai bentuk penyimpangan," ujarnya.

Dalam penelaahan yang dilakukan, MUI juga menemukan dugaan penyalahgunaan izin usaha di sejumlah lokasi. Terdapat sekitar 20 titik yang diduga beroperasi secara terselubung, bahkan ada yang menggunakan izin usaha perdagangan beras untuk aktivitas yang tidak sesuai dengan perizinannya.

Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana menegaskan pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti hasil pembahasan bersama MUI dan instansi terkait. "Beberapa izin operasional sudah diproses untuk ditutup, tinggal melengkapi administrasi. Satpol PP juga akan menyusun hasil pemeriksaan dan penindakan sebelum dilakukan rapat lanjutan untuk menentukan langkah berikutnya," kata Mimik.

Menurut Mimik, pemerintah juga akan menjalin koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat untuk merencanakan penindakan secara serentak apabila seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi. (md/rus)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pemkab Sidoarjo Komitmen Wujudkan Lingkungan Sehat dan Bebas Pencemaran

Sidoarjo, Pojok Kiri,- Pemkab Sidoarjo terus berupaya maksimal dalam wujudkan lingkungan sehat termasuk melalui penilaian Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 5 Pilar. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup warga sekaligus menekan risiko penyakit berbasis lingkungan. Proses verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikator STBM Provinsi Jawa Timur di enam kecamatan dan 12 desa/kelurahan yang menjadi sampel. Lokasi tersebut meliputi Kecamatan Buduran (Desa Sidokepung dan Wadungasih), Waru (Desa Tambak Sumur dan Tambak Sawah), Sedati (Desa Pabean dan Sedati Agung), Tanggulangin (Desa Ketapang dan



Putat), Porong (Desa Candipari dan Glagaharum), serta Prambon (Desa Jati Alun-alun dan Temu). Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati menyatakan, capaian sanitasi Sidoarjo sejauh ini merupakan hasil kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Menurut dia, komit-

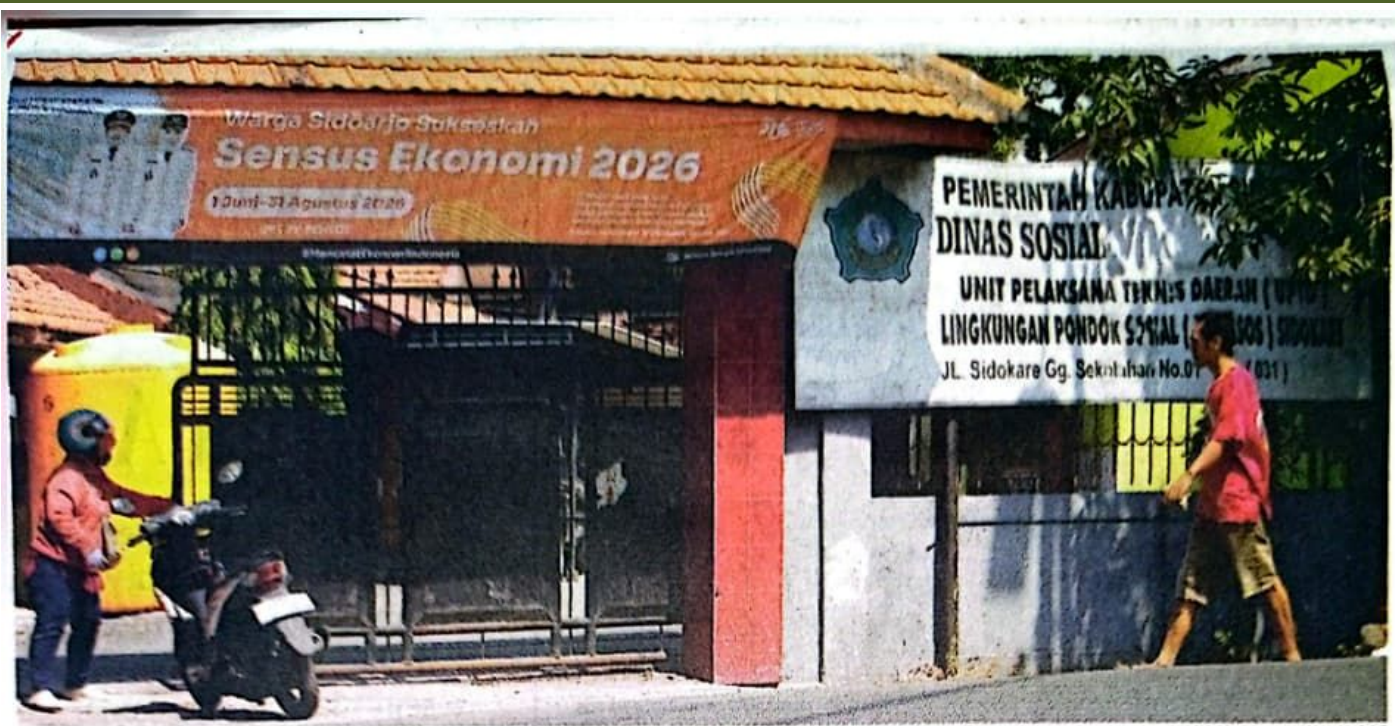
men daerah tidak berhenti pada status Open Defecation Free (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan yang diraih pada 2024, melainkan berlanjut menuju status STBM Paripurna. "Dari total 604.048 kepala keluarga di Sidoarjo, sebanyak 308.789 KK telah disurvei dan

hasilnya 100 persen berstatus ODF. Ini menjadi modal penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat," kata Fenny dalam rapat koordinasi STBM di Kantor Setda Sidoarjo, Selasa (21/7/2026). Selain status ODF, indika-

tor penerapan sanitasi lainnya di Sidoarjo menunjukkan tren positif. Sebanyak 99,78 persen rumah tangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, 95,43 persen pengelolaan sampah rumah tangga, serta 73,6 persen telah memiliki pengelolaan air limbah rumah tangga. Fenny menegaskan, upaya memenuhi target 100 persen pada seluruh pilar membutuhkan sinergi lintas sektor (hexahelix). Sanitasi tidak dapat dipandang hanya sebagai isu kesehatan, tetapi juga berkelindan dengan lingkungan, infrastruktur, pendidikan, peran dunia usaha, media, dan kesadaran warga. Pemkab Sidoarjo Terus Berusaha Wujudkan Lingkungan Sehat Bagi Masyarakat

Sementara itu, Tim Verifikator STBM Provinsi Jawa Timur mengapresiasi rekam jejak Sidoarjo. Setelah meraih predikat ODF pada 2024, Sidoarjo meraih Juara 1 STBM Award Tingkat Pratama Nasional (2024) dan Tingkat Madya Nasional (2025). Pada 2026, Pemprov Jatim mendorong seluruh daerah bergerak masif memenuhi 5 Pilar STBM secara komprehensif. Dalam verifikasi lapangan, tim meninjau langsung penerapannya di pemukiman warga. Penilaian ini bertujuan memastikan capaian sanitasi tidak sebatas data administratif, melainkan benar-benar tecermin dalam perilaku hidup bersih dan sehat warga sehari-hari. (Khol/Dy)

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT



ANGGER BONDAN/JAWA POS

BAKAL DIRELOKASI: Penghuni Liponsos di Sidokare sudah melebihi kapasitas.

Overload, Liponsos Dipindah ke Wonoayu Tahun Depan

SIDOARJO- Pemkab Sidoarjo bakal merelokasi Liponsos dari Sidokare ke Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu. Lahan seluas 22 ribu meter persegi disiapkan untuk bangunan anyar yang rencana dibangun tahun depan.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Sidoarjo Muhammad Wildan mengatakan, relokasi harus dilakukan karena liponsos yang ada di Sidokare sudah overload. "Daya tampung hanya 75 orang. Sekarang penghuni mencapai lebih dari 100 orang,"

katanya kemarin (22/7).

Menurut Wildan, relokasi sudah direncanakan sejak lama. Namun gagal karena anggaran yang diajukan tidak mendapatkan persetujuan dari dewan. Setelah relokasi, penghuni nantinya akan dipisahkan berdasarkan kategori sehingga penanganannya lebih mudah. Konsep itu juga dilengkapi ruang khusus untuk kebutuhan penanganan tertentu.

Selain gedung utama, kawasan tersebut akan dilengkapi delapan asrama, dapur umum, kafetaria, gudang,

kamar mandi umum, dan pendopo. "Kalau sekarang masih tercampur, nanti akan dipisah-pisah sesuai kategorinya," ujarnya.

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Usman memastikan rencana pembangunan Liponsos sudah mendapat dukungan penganggaran. Usman berharap, relokasi menjadi solusi atas kondisi Liponsos yang sudah tidak lagi ideal. Pemkab juga tidak lagi bergantung pada aset milik Pemprov untuk menjalankan layanan tersebut. **(ful/hen)**

Jawa Pos

Kementan Borong Benih Jagung Karya ITS

■ Dibagikan Gratis kepada Petani

SEDATI-Kementerian Pertanian (Kementan) RI memborong benih jagung hibrida varietas MTE-09 hasil pengembangan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya senilai Rp 10 miliar. Benih tersebut akan didistribusikan secara gratis kepada petani untuk ditanam di lahan seluas 13.000 hektare sebagai upaya meningkatkan produktivitas jagung nasional.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman saat mengunjungi Kampus ITS Buncitan, Dusun Buncitan, Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten



KETAHANAN PANGAN: Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman meninjau benih jagung hibrida MTE-09 hasil riset ITS di Kampus ITS Buncitan, Sedati, Sidoarjo, Rabu (22/7).

Sidoarjo, Rabu (22/7).

Amran mengatakan, varietas MTE-09 dipilih karena memiliki potensi produktivitas hingga 10 ton

per hektare. Angka itu jauh lebih tinggi dibanding rata-rata produktivitas jagung nasional yang pada 2024 mencapai 5,94

ton per hektare.

"Hari ini (kemarin, red) kami langsung melakukan transaksi pembelian.

● Ke Halaman 10

Kementan Borong...

Benih ini akan kami bagikan gratis kepada petani. Kami juga meminta ITS mendampingi petani hingga produktivitas rata-rata bisa mencapai 10 ton per hektare. Kalau target itu tercapai, produksi jagung nasional akan meningkat tanpa perlu menambah luas lahan," ujarnya.

Menurut Amran, penyaluran benih tahap awal akan diprioritaskan kepada petani di sekitar ITS. Langkah itu dilakukan agar tim peneliti dapat mendampingi proses budidaya sekaligus mengevaluasi performa benih hingga masa panen.

Selain menyerap benih jagung, Kementerian Pertanian juga akan mengadopsi sejumlah inovasi mekanisasi pertanian hasil karya ITS.

Di antaranya Traktor Perahu Existing bertenaga listrik yang dapat digunakan di sawah maupun lahan kering, ROPATAMA, yakni transplanter padi listrik empat baris, serta MOCITS (Motor Climber ITS) yang membantu petani memanjat pohon kelapa dengan lebih aman dan efisien. (dik/vga)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

KONI Sidoarjo akan Beri Reward Juara Porkab Sidoarjo

Sidoarjo, Bhirawa

KONI Sidoarjo akan memberikan reward kepada para atlet Sidoarjo yang menjadi juara, saat event Porkab Sidoarjo 2026, yang telah digelar sejak 15 Juni - 30 Juni 2026. Plt Ketua Umum KONI

Sidoarjo, Imam Purwanto, Rabu (22/7) mengatakan, pemberian reward sebagai penghargaan kepada para atlet dan untuk memberikan motivasi atlet, agar semakin berprestasi pada event - event kejuaran olah raga selanjut-

nya. Baik di tingkat kabupaten, Provinsi bahkan Nasional.

Dari catatannya, ada sebanyak 1.941 atlet yang menjadi juara dalam event Porkab Sidoarjo 2026 tersebut. Mulai dari juara 1, juara 2 dan juara 3. Disampaikan,

dalam event PORKAB Sidoarjo tersebut, ada sebanyak 52 Cabang yang mengikutinya. "Event Porkab ini sebagai salah satu seleksi dan pembinaan atlet untuk menuju event Porprov Jatim ke-X tahun 2027 nanti," ujarnya. [kus.wwn]

HARIAN

Bhirawa

Bina Rakyat Bina Bangsa

Pertahankan Juara Umum MTQ Kabupaten

BILA di level dunia, Negara Argentina tidak mampu untuk mempertahankan juara dalam piala dunia sepak bola 2026, tetapi di level kabupaten, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, tahun 2026 ini tetap mampu mempertahankan sebagai juara bertahan dalam MTQ Kabupaten Sidoarjo 2026.

Camat Gedangan, Asmara Hadi SSTP MAP, tersenyum dan mengucapkan syukur Alhamdulillah, atas kemenangan yang diumumkan pada Senin malam (20/7) kemarin, di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo itu.

“Ini doanya ban-

» ke halaman 11



Asmara Hadi

Pertahankan Juara Umum MTQ Kabupaten

● Sambungan hal 1

yak orang, peserta, pembina, orang tua, dan pihak kecamatan,” komentar Asmara Hadi, Selasa (21/7) kemarin.

Mantan Camat Tulungan itu tidak memungkiri sebelum diumumkan, dirinya sempat merasa deg degan juga. Tetapi setelah tahu juara, dalam even yang dielar di kabupaten Sidoarjo setiap dua tahun sekali itu, dirinya melakukan syukur.

“Karena biasanya mempertahankan itu jauh lebih sulit daripada memulai,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Kafilah MTQ Kecamatan Gedangan, pada tahun 2024 lalu, memulai langkah awal dalam merebut juara umum,

pada event yang merebutkan piala Bupati Sidoarjo itu.

“Kami berdoa dan akan berihktiar, semoga pada MTQ Kabupaten di tahun 2028 nanti, kafilah dari Kecamatan Gedangan, masih tetap bisa mempertahankan lagi sebagai juara umum,” ujarnya semangat.

Pada event MTQ Kabupaten 2026 ini, kata Asmara, pembina MTQ Kecamatan Gedangan, telah mengirim sebanyak 56 orang peserta. Semua cabang nomor yang ditandingkan mulai tanggal 17 -20 Juli itu, diikuti oleh kafilah kecamatan Gedangan.

Jumlah total peserta yang mengikuti event ini ada 520 orang berasal dari 18 kecamatan. Kecamatan Gedangan termasuk paling banyak yang

mengirimkan pesertanya.

Dengan kemenangan dari kafilah MTQ kecamatan Gedangan ini, Asmara Hadi berharap para peserta dari Kecamatan Gedangan, akan bisa banyak ikut dalam seleksi ajang MTQ Provinsi Jatim tahun 2027 nanti di Kabupaten Tulungagung.

“Agar kemampuan para qori dan qoriah dari Kecamatan Gedangan ini, semakin meningkat,” katanya.

Pada MTQ ke- 32 kabupaten Sidoarjo tahun 2026 ini, ada sebanyak 40 -46 cabang nomor yang ditandingkan. Diantaranya, cabang tilawah, tilawah tuna netra, tahfidz Alquran, Tafzir alquran bahasa Indonesia, Arab dan Inggris, kaligrafi dan masih banyak lagi. [kus.gat]



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

KONDISI RTH DESA KEBOGUYANG SANGAT MEMPRIHATINKAN

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

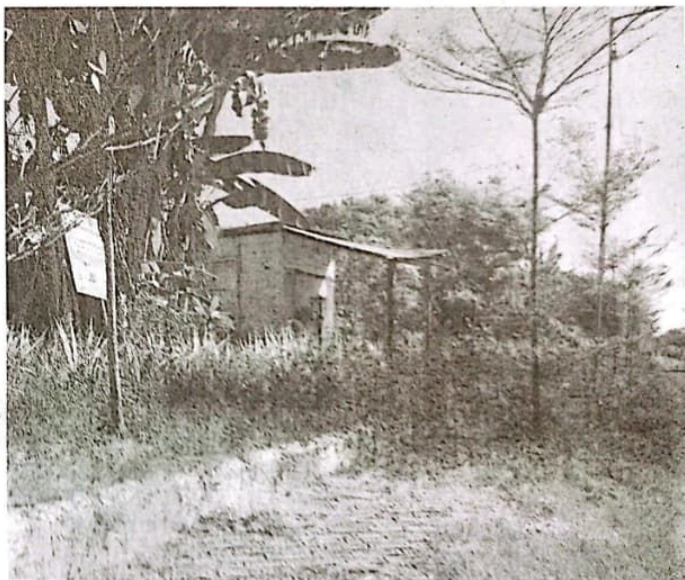
Kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Desa Keboguyang Kecamatan Jabon saat ini kondisinya sangat memprihatinkan, pasalnya Ruang Terbuka Hijau Tersebut banyak Di tumbuh rumput - rumput liar serta tanamannya Banyak Yang Mati, di sertai pula bangunan media taman yang terbuat dari beton warnanya sudah kusam sehingga memberikan pandangan kumuh bagi warga yang melintas di Desa Tersebut.

Dengan kondisi tersebut tentunya pemerintah Desa Harus hadir dalam hal perawatan, karena pada Prinsipnya Pengelolaan RTH didasarkan pada prinsip mempertahankan RTH yang sudah ada dan Pengelolaan RTH dilakukan dengan tujuan untuk meningkat-

kan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta meningkatkan estetika Desa/kota.

Dari pantauan Jurnalis Pojok Kiri di Lokasi Rabu (15/7) Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Desa Keboguyang patut mendapat perhatian. Selain tak terawat, sejumlah fasilitas yang ada di sekitar RTH juga rusak dan butuh perbaikan apalagi lokasi RTH tersebut berada di Jalur Hijau pada Median Jalan raya dan areal kanan kiri jalan raya.

Saat konfirmasi kepada kepala Desa Rabu (22/7) kepala Desa Kebo Guyang belum bisa memberikan keterangan resmi terkait kondisi Ruang Terbuka Hijau yang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. (Nang)



POJOK KIRI
KORAN RAKYAT



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

✓

Dump Truck Dilarang Lewat Bekas Tol HK saat Jam Berangkat Sekolah



SIDOARJO- Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo mengkaji pembatasan operasional dump truck di jalan eks Tol Hutama Karya (HK). Kendaraan besar tersebut dilarang melintasi

bekas tol selama jam berangkat sekolah yakni pukul 06.00 hingga 08.00.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Sidoarjo Khoirul Anam mengatakan, usulan itu muncul karena ruas tersebut setiap pagi dipadati pelajar yang berangkat ke sekolah. Pada waktu yang sama, dump truck masih melintas sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. "Yang kami utamakan keselamatan pengguna jalan, terutama anak-anak yang berangkat sekolah pada jam tersebut," katanya.

Selain menjadi jalur padat aktivitas warga, jalan eks Tol HK juga beberapa kali menjadi lokasi kecelakaan lalu lintas. Itu menjadi salah satu bahan pertimbangan dishub dalam menyusun pengaturan jam operasional kendaraan berat. Kajian juga dilakukan agar kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan persoalan lalu lintas di ruas lain.

"Saat ini, kami masih membahas dengan Polsek Jabon sebelum aturan diberlakukan," ujarnya. Hasil kajian nantinya akan menjadi dasar penetapan waktu pelaksanaan sekaligus teknis pengawasan. "Kemungkinan penerapannya mulai bulan depan," tambah Khoirul.

Dishub menyiapkan skema pengawasan agar aturan tersebut dapat berjalan efektif saat diterapkan. Pengawasan akan melibatkan kepolisian untuk memastikan kendaraan berat mematuhi pembatasan yang telah ditetapkan. (ful/hen)

capai lebih dari 100 orang,"
umum, kafetaria, gudang, tersebut (ful/hen)

paipalliya. (eza/hen)

ATUR JAM MELINTAS:
Pembatasan operasional
dump truck di eks Tol HK
dimulai Agustus.

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Toko Miras di Sarirogo Langgar Izin

Satpol PP Siapkan Penindakan

SIDOARJO – Keluhan terkait keberadaan toko minuman keras (miras) di lingkungan sekolah atau tempat ibadah di kawasan Sarirogo ditindaklanjuti Pemkab Sidoarjo. Satpol PP Sidoarjo bakal melakukan penertiban setelah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (DPMPTSP) Sidoarjo memastikan aktivitas usaha di toko tersebut tidak sesuai dengan izin yang dimiliki.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Gakda) Satpol PP Sidoarjo Anas mengatakan, pihaknya telah memeriksa aktivitas usaha di lokasi dan menemukan adanya dugaan penyimpangan perizinan. Hasil temuan itu kemudian dikoordinasikan dengan DPMPTSP dan dinyatakan

tidak sesuai dengan izin yang tercatat.

"Kami akan mengambil langkah tegas untuk penertiban," katanya kemarin (22/7). Anas belum merinci kapan penertiban dilakukan. Namun, dia memastikan penindakan akan melibatkan sejumlah instansi.

Izin untuk Gudang

Kepala Bidang Perizinan Sektor I DPMPTSP Sidoarjo Ana Musyarifah membe-



Tidak ada izin untuk menjual miras secara eceran. Hanya alamat gudang atau kantor."

Ana Musyarifah
Kepala Bidang Perizinan Sektor I
DPMPTSP Sidoarjo

narkan hasil pemeriksaan Satpol PP. Berdasarkan penelusuran dokumen, izin yang dimiliki memang tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. "Tidak ada izin untuk menjual mi-

ras secara eceran. Hanya alamat gudang atau kantor," kata Ana.

Dia menjelaskan, izin yang dimiliki pelaku usaha hanya diperuntukkan bagi kegiatan distribusi di Ba-

longbendo. Karena itu, aktivitas penjualan minuman beralkohol secara eceran di Desa Sarirogo merupakan bentuk penyimpangan dari izin usaha yang diterbitkan. Temuan tersebut menjadi dasar pemerintah daerah melakukan penertiban.

DPMPTSP meminta satpol PP segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut sesuai kewenangannya. Keberadaan toko miras yang

meresahkan harus ditertibkan. Apalagi, sudah ada aduan terkait toko yang berpotensi mengganggu aktivitas pendidikan.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyoroti sejumlah toko miras yang berdekatan dengan sekolah dan tempat ibadah. MUI meminta tempat usaha ditertibkan. Selain melanggar aturan, keberadaannya juga meresahkan. (ful/hen)

Jawa Pos

Alfamart dan Cussons Gelar Layanan Kesehatan Gratis



EFEKTIF: Program Alfamart Sahabat Posyandu di Grand Royal Regency beberapa waktu lalu.

SIDOARJO-Alfamart bersama Cussons Baby telah menggelar program Alfamart Sahabat Posyandu di Grand Royal Regency, Sidoarjo. Program yang diluncurkan sejak 2023 itu menjadi salah satu upaya memperluas akses layanan kesehatan dasar sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak.

Melalui program tersebut, masyarakat mendapatkan berbagai layanan kesehatan yang diselenggarakan bersama Dinas Kesehatan dan kader posyandu setempat. Selain pemeriksaan kesehatan, peserta juga memperoleh edukasi mengenai pemenuhan gizi anak serta pola asuh yang mendukung tumbuh kembang optimal pada masa awal kehidupan.

General Manager Corporate Communications Alfamart, Rani Wijaya, mengatakan kolaborasi dengan Cussons Baby merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.

"Melalui pemanfaatan gerai Alfamart yang berada dekat dengan lingkungan masyarakat, kami ingin menghadirkan layanan kesehatan yang lebih mudah diakses oleh ibu dan anak. Program ini juga menjadi sarana edukasi agar orang tua semakin memahami pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak secara berkala," ujar Rani.

Sementara itu, Ketua Kader Posyandu Pos 1 RW 16 Grand Royal Regency, Fitri Ardini, mengatakan kegiatan kali ini bertepatan dengan masa libur sekolah sehingga dikemas lebih

menarik agar masyarakat semakin antusias mengikuti layanan posyandu.

"Karena bertepatan dengan liburan sekolah, kami membuat kegiatan lebih menarik

dengan menyediakan berbagai doorprize. Kami juga menyiapkan area bermain untuk anak-anak agar mereka merasa nyaman selama kegiatan berlangsung," katanya. (vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



PRODUK MAHASISWA: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kanan) mengecek alat dan mesin pertanian karya ITS.

ANGGER BONDAN/JAWA POS

Mentan Borong 10 Alat dan Mesin Pertanian ITS

SIDOARJO – Inovasi pertanian karya Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) mendapat kepercayaan pemerintah pusat. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memborong 200 ton benih jagung hibrida MTE-09 hasil riset ITS. Selain itu, Kementerian Pertanian (Kementan) juga memesan 10 unit alat dan mesin pertanian (alsintan) hasil inovasi mahasiswa untuk mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian.

Amran mengatakan, 200 ton benih jagung MTE-09 akan digunakan untuk lahan seluas sekitar 13 ribu hektare. Benih MTE-09 dipilih ka-

rena memiliki produktivitas tinggi yakni mencapai sekitar 10 ton jagung pipilan per hektare. Angka tersebut jauh melampaui rata-rata produktivitas jagung nasional yang berada di kisaran 5,94 ton per hektare.

"Kami bangga memilih benih ini karena produktivitasnya di atas rata-rata nasional," katanya usai penandatanganan kerja sama Kementerian Pertanian dengan ITS di Kampus ITS Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, kemarin (22/7).

Amran menjelaskan, benih yang dibeli pemerintah itu akan dibagikan secara gratis kepada petani di sejumlah ka-

bupaten/kota di sekitar Surabaya. Harapannya, penggunaan benih unggul mampu meningkatkan hasil panen sekaligus mendorong produksi jagung nasional. Tak hanya benih jagung, Kementan juga memesan traktor perahu listrik amfibi dan alat pemanjat kelapa hasil inovasi ITS.

Rektor ITS Bambang Pramuji mengatakan, seluruh alat yang diperkenalkan saat ini masih berstatus prototipe dan akan terus disempurnakan berdasarkan hasil uji coba di lapangan. Namun, untuk alat pemanjat kelapa dan traktor perahu listrik, tahapan pengujian telah selesai dilakukan. (eza/hen)

Jawa Pos

Sebanyak 93 Unit KDMP di Sidoarjo Gerai Sudah Selesai

Sidoarjo, Bhirawa

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo melaporkan sampai Rabu (22/7) kemarin, dari 346 unit Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang ada, tercatat ada sebanyak 93 unit pembangunan gerainya sudah selesai 100%.

Meski belum semuanya total selesai, tetapi ada sejumlah KDMP yang sudah bisa melakukan transaksi atau sudah operasional. Diantaranya KDMP di Desa Prasung Kecamatan Buduran, KDMP Desa Bangah Kecamatan Gedangan, KDMP Desa Tambakkalisogo Kecamatan Jabon dan Desa Sumorame Kecamatan Candi.

"Total KDMP yang sudah bisa melakukan transaksional ada 68 unit," kata Kepala Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Sidoarjo, M Edi Kurniadi ST MM, Rabu (22/7) kemarin.

Dari 68 unit KDMP itu, diakui Edi, mayoritas bergerak pada pemenuhan kebutuhan Sembako warga masyarakat. Dirinya berharap, kalau bisa ada KDMP yang bergerak pada bidang lain, agar lebih bervariasi. Misal bidang pertanian, perikanan dan lain-lain.

Pembangunan gerai KDMP di Kabupaten Sidoarjo, menurut Edi, saat ini terus bergerak untuk penyelesaian. Dari catatan yang ia terima, sebanyak 32 unit KDMP saat ini proses penyelesaiannya sedang berjalan atau kurang dari 20%. Kemudian, ada KDMP yang proses pembangunannya sedang berjalan atau masih kurang 21% hingga 50% sebanyak 48 unit.

Dan ada KDMP yang proses pembangunan gerainya sedang berkisar 51% - 75% sebanyak 54 unit. Terakhir, sebanyak 17 unit KDMP yang pembangunannya sudah lebih dari 75%. [kus.fen]



Tampilan bangunan KDMP yang ada di Desa Prasung Kec Buduran.

istimewa



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Miskin Ekstrem Kakak Adik Putus Sekolah, Komisi D DPRD Sidoarjo Perjuangan Hak Pendidikan



Sidoarjo, petisi.co – Akibat kemiskinan ekstrem, dua anak di Dusun Pager Desa Sawotratap Gedangan harus kehilangan kesempatan melanjutkan sekolah. Selain itu, Adik kakak, Alhilmi Ilman (12) dan Maulana Yusuf Alamsyah (15) ini juga mengalami malnutrisi, dikarenakan minimnya asupan makanan. Kondisi memprihatinkan yang dirasakan kedua anak piatu tersebut, terungkap saat anggota komisi D DPRD Sidoarjo, H. Tarkit Erdianto, S.H.,M.H., mendatangi lokasi tinggal mereka, di sebuah kamar kos berukuran 3x3 meter persegi. "Sangat prihatin, melihat kondisi kedua anak ini. Selain putus sekolah, karena faktor kemiskinan. Mereka juga diketahui tidak memiliki makanan sehari-hari," ungkap Tarkit, Rabu (22/7/2026). Dari hasil sidak di lokasi, kedua anak itu diketahui tinggal di kamar kos Jalan Raden Wijaya, Gang Masjid bersama ayahnya. Sedangkan sang ibu telah lama meninggal dunia. "Menurut tetangga kos, sejak ibunya meninggal tahun 2022, kehidupan kedua anak putus sekolah ini, menjadi tak teratur. Ayahnya kerja serabutan dan jarang pulang," tuturnya. Tarkit juga sempat mengundang Elok Yuniarsandi, salah seorang Guru di SDN Sawotratap 2 tempat Alhilmi menimba ilmu sebelumnya. Dari komunikasi itu, diketahui kondisi kedua anak ini sudah tidak mampu melanjutkan pendidikan lantaran kesulitan keuangan. "Gurunya tadi sempat bilang Alhilmi sudah tidak bersekolah pasca lulus dari SDN Sawotratap 2. Ia tidak mampu melanjutkan ke jenjang SMP di tahun ajaran 2026/2027 ini. Demikian pula kakaknya, Maulana gagal meneruskan ke jenjang SMA. Kakak adik ini putus sekolah karena tidak ada biaya," serunya. Melihat kondisi Kedua bersaudara tersebut, Ketua fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPRD Sidoarjo ini, akan segera mengambil langkah agar Alhilmi dan Maulana bisa kembali bersekolah. "Sebetulnya masih ada adik bungsu dari mereka berdua ini. Namun karena kondisi ekonomi memburuk. Adiknya harus tinggal bersama neneknya di Kabupaten Gresik. Persoalan ini harus segera membutuhkan penanganan cepat, baik dari sisi pendidikan maupun sosial," tandasnya. Namun demikian, kata Tarkit, kendala utama yang dihadapi adalah administrasi kependudukan (adminduk) karena keluarga tersebut masih ber-KTP Kabupaten Gresik. Meski demikian, ia memastikan hal itu tidak akan menghentikan upaya penyelamatan pendidikan kedua anak tersebut. "Nanti teman-teman Dinsos akan berkoordinasi dengan Dinsos Kabupaten Gresik. Begitu juga Dikbud Sidoarjo akan berkoordinasi dengan Dikbud Kabupaten Gresik. Langkah apa yang harus dilakukan, kewenangan dan kewajibannya akan dibahas bersama," katanya. Politisi senior PDI Perjuangan itu menegaskan, Komisi D tidak ingin ada anak di Sidoarjo kehilangan hak memperoleh pendidikan. "Jangan sampai ada anak putus sekolah. Itu bagian dari tanggungjawab kita



bersama. Anak-anak kita harus sekolah sesuai amanat konstitusi," tegasnya. Tarkit juga optimis kedua anak tersebut masih memiliki peluang untuk kembali mengenyam pendidikan, termasuk melalui sekolah swasta apabila memungkinkan. "Insya Allah bisa, kita harus bisa. Masa harus menunggu satu tahun? Dikbud harus mengambil langkah, harus action. Saya yakin ini bisa diselesaikan," tuturnya. Ia mengaku tersentuh melihat semangat kedua anak tersebut yang masih ingin melanjutkan sekolah. "Kalau kita lihat bersama tadi, anak-anak ini sangat antusias untuk sekolah lagi. Dengan semangat seperti itu, kalau kita diam saja, rasanya berdosa," ungkapnya. Sementara itu, tokoh masyarakat setempat, Martono mengungkapkan keluarga Alhilmi sudah lama tinggal di lingkungan tersebut dan hidup dalam keterbatasan. "Sudah lama sekali tinggal di sini. Sejak kecil memang di sini. Tapi kondisinya ekonominya sangat minim. Bapaknyanya seadanya," ujarnya. Martono menjelaskan, ayah kedua anak itu bekerja serabutan, bahkan sesekali menjadi sukarelawan pengatur lalu lintas (supeltas) di sekitar Rumah Sakit Mitra Keluarga Waru. "Kalau ada pekerjaan ya ikut. Kalau tidak ada, kadang jadi nyempit atau polisi cepek. Itu pun kadang berebut tempat dengan yang lain. Karena pekerjaan ala kadarnya itu, ayah dua anak ini sering nunggu bayar kos setiap bulannya sekitar Rp450 ribu," tuturnya. Ia berharap perhatian dari DPRD dan pemerintah dapat menjadi jalan keluar bagi masa depan kedua anak tersebut. "Saya sangat prihatin. Alhamdulillah ada Pak Tarkit dan tim datang melihat langsung. Mudah-mudahan ini benar-benar membantu mereka, karena pendidikan adalah hak setiap anak," katanya. Dari sisi sosial, Pendamping Rehabilitasi Sosial (Rehsos) Kementerian Sosial, Edrian AP, menilai keluarga tersebut sebenarnya memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan sosial. "Menurut kami kondisinya sangat memprihatinkan. Yang bersangkutan sebenarnya layak mendapat bantuan sosial, baik kebutuhan dasar maupun nutrisi," ujarnya. Namun, ia mengakui penanganan masih terkendala status administrasi kependudukan yang berada di luar Kabupaten Sidoarjo. "Kami akan berkoordinasi lebih lanjut. Hasil survei lapangan akan kami sampaikan kepada pimpinan, kemudian dikoordinasikan dengan pemerintah desa dan pihak terkait," jelasnya. Edrian mengatakan bantuan yang paling mendesak adalah pemenuhan kebutuhan dasar keluarga tersebut. "Kemungkinan bantuan awal berupa sembako dan kebutuhan makan sehari-hari. Dari informasi warga, orang tuanya sampai memancing untuk mencari makan anak-anaknya," ungkapnya. Di sisi lain, Maulana Yusuf Alamsyah mengaku sangat ingin kembali melanjutkan sekolah, namun kondisi ekonomi keluarga membuat keinginannya harus tertunda. "Seharusnya tahun ini saya sudah kelas 1 SMA, tapi tidak melanjutkan sekolah," ucapnya lirih. Maulana mengatakan ayahnya bekerja serabutan dan tidak selalu berada di rumah karena harus mencari nafkah. "Ayah kerja serabutan, bantu-bantu orang. Kadang pulang, kadang sebulan sekali baru pulang. Ibu meninggal tahun 2022, waktu saya lulus SD, pas masa COVID-19," tutupnya dengan raut wajah sedih. (luk)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

12 Desa di Sidoarjo Diverifikasi, Pemkab Pastikan Warga Terapkan 5 Pilar Hidup Bersih dan Sehat



SIDOARJO | MEDIASOROTMATA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus mengajak masyarakat membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat melalui penerapan lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Komitmen tersebut diperkuat dengan pelaksanaan verifikasi lapangan oleh Tim Verifikator Provinsi Jawa Timur di 12 desa sampling, Rabu (22/7/2026). Kegiatan dilakukan untuk memastikan praktik sanitasi telah menjadi kebiasaan sehari-hari warga. Verifikasi lapangan dilakukan di enam kecamatan, yakni Kecamatan Buduran, Waru, Sedati, Tanggulangin, Porong, dan Prambon. Sebanyak 12 desa dipilih sebagai lokasi sampling, yaitu Desa Sidokeping dan Wadungasih, Desa Tambak Sumur dan Tambak Sawah, Desa Pabean dan Sedati Agung, Desa Ketapang dan Putat, Desa Candipari dan Glagaharum, serta Desa Jati Alun-alun dan Temu. Dalam pelaksanaannya, tim verifikator melakukan penilaian terhadap satu sekolah dan 25 kepala keluarga (KK) di setiap desa. Penilaian dilakukan melalui observasi, wawancara, serta pengecekan langsung terhadap penerapan lima pilar STBM, yakni stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, serta pengelolaan air limbah rumah tangga. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dr. Lakshmi Herawati Yuwantina mengatakan verifikasi lapangan bukan sekadar tahapan penilaian, melainkan menjadi sarana untuk memastikan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat benar-benar diterapkan masyarakat. “Verifikasi ini bukan hanya mengecek administrasi, tetapi memastikan lima pilar STBM sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Sanitasi yang baik dimulai dari rumah tangga. Jika seluruh warga konsisten menerapkannya, maka lingkungan akan semakin bersih, resiko penyakit dapat ditekan, dan kualitas hidup masyarakat akan meningkat,” ujarnya. Ia menambahkan, keberhasilan mewujudkan STBM lima pilar membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. “Sanitasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau tenaga kesehatan, tetapi menjadi tanggung jawab bersama mulai dari keluarga, sekolah, pemerintah desa, hingga dunia usaha,” katanya. Ketua tim verifikasi lapangan, drg. Sulvy Dwi Anggraini menjelaskan, selain melihat kondisi sarana sanitasi, tim juga menggali kebiasaan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui wawancara langsung dengan warga dan pihak sekolah. Hasil verifikasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar penguatan program sanitasi di Kabupaten Sidoarjo. “Kami akan memilih secara acak rumah yang ingin kami cek kebiasaan masyarakatnya apakah sudah memenuhi STBM 5 pilar atau belum kami yang menilai,” ungkapnya. Saat di lapangan, tim verifikator juga mewawancarai seputar cara mencuci tangan yang benar, cara memilah sampah rumah tangga, pengelolaan makanan dan minuman, dan memastikan septic tank memenuhi standar. Sebelumnya, Kabupaten Sidoarjo telah berhasil mencapai status Open Defecation Free (ODF) pada 2024, sekaligus meraih STBM Award Tingkat Pratama Nasional. Prestasi tersebut kembali berlanjut pada 2025 dengan diraihnya STBM Award Tingkat Madya Nasional. Melalui verifikasi lapangan ini, Pemkab Sidoarjo berharap penerapan lima pilar STBM semakin membudaya sehingga terwujud lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. (NURI)

